



Nomor : 159/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 02 Mei 2024

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**

**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPO  
atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya  
Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Kamis, 16 Mei 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO yang telah dilakukan pada Kamis, 2 Mei 2024 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors

# Momentum Ramadan dan Depresiasi Rupiah Tingkatkan Inflasi Inti

**JAKARTA, ID** – Inflasi inti tahunan diyakini meningkat dari 1,77% pada Maret 2024 menjadi 1,82% pada April 2024. Hal ini terjadi karena kenaikan permintaan saat Hari Raya Lebaran serta terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah. Sedangkan laju inflasi tahunan diperkirakan akan relatif stabil pada 3,02% pada April 2024 dan sesuai target inflasi yang di kisaran 2,5±1%.

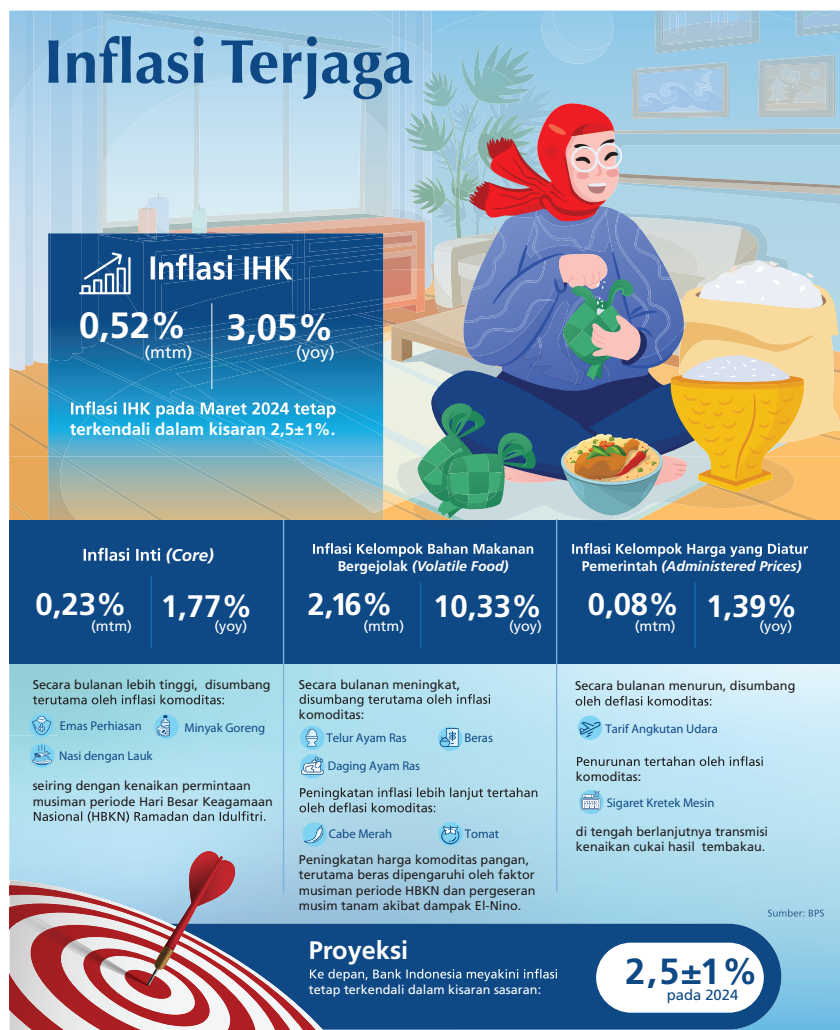
Oleh **Arnoldus Kristianus**

**K**epala Ekonom Bank Permata Josua Parde mengatakan, inflasi diperkirakan akan meningkat secara moderat dari 2,61% pada 2023 (tahun dasar 2018=100) atau 2,81% pada 2023 (tahun dasar 2022=100) menjadi sekitar 3,08% pada akhir tahun 2024. "Laju inflasi inti tahunan diperkirakan meningkat jadi 1,82%, karena didorong oleh peningkatan permintaan selama periode Lebaran, kenaikan harga emas, dan inflasi impor yang lebih tinggi karena depresiasi rupiah," kata Josua Parde kepada *Investor Daily*, Rabu (1/5/2024).

Josua berpendapat, inflasi pada akhir tahun 2024 akan berada dalam kisaran target 1,5% sampai dengan 3,5%, dengan potensi tekanan ke atas pada paruh pertama tahun 2024 yang berasal dari dampak El Nino dan inflasi impor yang lebih tinggi akibat depresiasi rupiah, di tengah risiko suku bunga kebijakan global yang *higher-for-longer* dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Pada paruh kedua tahun ini, risiko kenaikan dapat muncul dari penerapan cukai plastik dan minuman kemasan berpemanis, sambil menunggu keputusan pemerintah mengenai kebijakan ini," kata Josua.

Sementara itu, laju inflasi bulanan pada April 2024 diperkirakan sebesar 0,27%. Angka ini menurun dari 0,52% dari posisi Maret 2024 atau selama periode Ramadan. Penurun-



an ini sebagian besar didorong oleh penurunan inflasi bahan makanan, yang secara khusus menurun karena puncak musim panen terjadi di bulan April 2024. "Musim panen cenderung dapat mengimbangi dampak dari Lebaran ketika permintaan bahan makanan biasanya meningkat

secara musiman," terang dia.

Pada bulan April 2024, beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga, termasuk beras, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit. Sebaliknya, harga-harga meningkat untuk komoditas seperti daging ayam, daging sapi, bawang

merah, bawang putih, dan minyak goreng. Kelompok pengeluaran lain yang berkontribusi terhadap inflasi adalah transportasi, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Menurut Josua, peningkatan ini terkait dengan meningkatnya permintaan selama liburan Lebaran.

"Khususnya untuk jasa transportasi, biaya rekreasi dan rekreasi, dan harga emas yang lebih tinggi dan depresiasi rupiah yang menyebabkan inflasi impor yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata dia.

## Monitoring Risiko

Di sisi lain, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Jowono mengatakan, pihaknya terus melakukan *monitoring* terhadap risiko kenaikan harga pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Beberapa sentra produksi bawang merah seperti Brebes, Demak dan Kendal sedang dalam kondisi banjir sehingga berimbas pada terganggunya pasokan distribusi komoditas tersebut.

"Hal terpenting yang harus kita waspadai adalah peningkatan harga bawang putih dari negara pemasok seperti Tiongkok. Kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi, salah satu caranya dengan mempercepat realisasi impor," tutur Doni.

Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah

(Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkuatkan kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.

"Dalam jangka panjang kami akan terus meningkatkan produksi, efisiensi rantai pasok, dan kerja sama petani-bulog, termasuk menyediakan sarana prasarana untuk peningkatan produktivitas, kerjasama antar daerah, fasilitas distribusi pangan, dan meningkatkan kualitas GNPIP sehingga bisa menurunkan harga beras di banyak daerah," ungkap Doni.

Deputy Gubernur BI Aida S Budiman memperkirakan, proyeksi inflasi secara keseluruhan tahun 2024 tetap dalam target 2,5±1%. BI berupaya memastikan agar inflasi tetap sesuai dengan skenario yang telah disusun sebelumnya dan tidak berdampak risiko yang ada. Guna mencapai target tersebut maka harus menjaga stabilitas inflasi harga pangan bergejolak.

"Volatile food akan terus terjaga terutama setelah paruh kedua 2024, ini akan mengalami penurunan. Dengan berbagai macam kondisi yang kita lihat, inflasi inti akan terjaga dan secara keseluruhan inflasi akan dalam kisaran 2,5±1%," kata Aida.

## Pemerintah Dorong Kolaborasi Mempercepat Keanggotaan Indonesia di OECD

**JAKARTA, ID** – Upaya penguatan kerja sama internasional menyandang peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif, guna mendorong transformasi ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan menyempatkan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi akses dengan Indonesia pada 20 Februari 2024. Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan *evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members*. Selanjutnya, OECD juga telah menyusun dan membahas Peta Jalan Akses Keanggotaan Indonesia yang telah disepakati oleh Dewan OECD pada

29 Maret 2024. Proses tersebut tergolong relatif cepat yakni selama 7 bulan sejak penyampaian intensi pada bulan Juli 2023.

"Penetapan Indonesia sebagai kandidat anggota OECD telah melalui berbagai proses, mulai dari keaktifan Indonesia sebagai negara mitra OECD hingga performa ekonomi Indonesia yang baik dan telah mendapat pengakuan dunia dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 maupun Asean," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Rabu (1/5/2024).

Transformasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, guna keluar dari *middle income trap* menuju negara berpendapatan tinggi. Ikhtiar melakukan transformasi ekonomi me-

rupakan langkah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ekonomi yang dilakukan mencakup berbagai sektoral, salah satunya yakni integrasi ekonomi global dan domestik.

"Apalagi dalam 4 tahun terakhir ini, perekonomian Indonesia terbukti mampu bertahan dan kembali menguat meskipun diterpa pandemi dan tantangan ekonomi global," kata dia.

Melalui keanggotaan dalam OECD tersebut, sejumlah dampak positif dapat diperoleh Indonesia mulai dari sebagai katalisator reformasi domestik dengan dukungan percepatan reformasi akses kepakaran, penelitian, dan analisis, berbagi *best practices* dari 300 lebih komite dan kelompok kerja, *peer review* akses data statistik terkini, serta dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional.

Selain itu, upaya tersebut mampu mendorong daya tarik investasi dengan meningkatkan kepercayaan dari investor karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi, serta Indonesia juga dapat berperan dalam pembentukan norma global melalui diskusi kebijakan OECD, ikut membentuk standar OECD terkait tata kelola pemerintahan, hingga memperluas cakupan global.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak positif yang dapat diperoleh Indonesia tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan percepatan proses akses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut. Untuk itu, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan

Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) atau Tim Nasional OECD, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Menko Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

## Akses Keanggotaan

Kemenko Perekonomian telah turut berkiprah dalam proses pengajuan keanggotaan Indonesia dalam OECD, dan hingga kini terus berkomitmen mengawal proses tersebut. Selain itu, Menko Airlangga juga diandalkan akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris,

Prancis pada 2-3 Mei 2024. Dalam PTM tersebut akan dilakukan serah terima secara resmi Peta Jalan Akses Keanggotaan kepada Indonesia.

Pascatahan tersebut, Indonesia akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap kesesuaian kebijakan dan standar nasional dengan kebijakan dan standar nasional OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua OECD, di mana Kemenko Perekonomian telah mengawal perekonomian Indonesia dan reformasi struktural dengan baik. (ark)



## Kunjungan Manaker

Menteri Ketenagakerjaan Idris Fauziah (kanan) dan Wamenaker Afriansyah Noor (kedua kanan) didampingi Presdir TMMIN Nandi Julyanto (ketiga kiri), Wapresdir Bob Azam (kedua kiri), mendengar penjelasan dari Direktur Widjanarko ((kiri) mengenai pelaksanaan TMMIN Logistics Skill Contest sebagai salah satu program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan daya saing industri nasional, di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB) Puninar Logistik, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).

**PANGGLAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianmanan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Heimi, S. H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalianmanan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11  
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, dan Bunga ke-19 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, dan Bunga ke-19 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
- Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, dan Bunga ke-19 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kurum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:  
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
  - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
  - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2024

